

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Amani, Asem. "Pemkab Magelang Tak Pernah Terbitkan Izin Tambang, Sekda: Itu Kewenangan Pusat." *Suara Merdeka.Com*, June 19, 2021. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04416973/pemkab-magelang-tak-pernah-terbitkan-izin-tambang-sekda-itu-kewenangan-pusat>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- AP, Agus. "Sengkarut Tambang Galian C Di Magelang, Pengusaha Pasir Kuasai 70 Persen Lahan." *Jawa Pos Radarsemarang.Id*, 2023. <https://radarsemarang.jawapos.com/magelang/721407643/sengkarut-tambang-galian-c-di-magelang-pengusaha-pasir-kuasai-70-persen-lahan>. 3.
- Arief, Ika Fitriana and Teuku Muhammad Valdy. "Tebing Di Lereng Gunung Merapi Longsor, 3 Penambang Pasir Tewas Tertimbun." *Kompas.Com*, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/19/103621778/tebing-di-lereng-gunung-merapi-longsor-3-penambang-pasir-tewas-tertimbun?page=all>.
- Ary.B.Prass. "Menilik Kualitas Pasir Merapi, Konon Lebih Hemat Semen." *Republika*, 2016. <https://news.republika.co.id/berita/oibux6414/kualitas-pasir-merapi-terbaik-kedua-di-dunia>.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Astuti, Indriyani. "Belasan Provinsi Sepakati Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Laut." *Media Indonesia*, 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/558667/belasan-provinsi-sepakati-batas-kewenangan-pengelolaan-sumber-daya-alam-di-laut>.
- Barkatullah, Abdul Halim, Et.al. *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*. First. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Berge, N.M Spelt dan J.B.M ten. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Cahyono, Heru Jarot. "Minimalisir ISPA Warrag Semprot Jalur Truk Pasir." *Antara News.Com*, 2012. <https://jogja.antaranews.com/berita/304280/minimalisir-ispa-warga-semprot-jalur-truk-pasir>.
- Dwinanda, Reiny. "Kualitas Pasir Merapi Terbaik Kedua Di Dunia." *Krjogja.Com*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/oibux6414/kualitas-pasir-merapi-terbaik-kedua-di-dunia>.
- ESDM, Kementerian. "LAPORAN AKTIVITAS GUNUNG API (VOLCANIC

- ACTIVITY REPORT).” *Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Last modified 2023. <https://magma.esdm.go.id/v1/gunung-api/laporan/search/q?code=MER&start=2023-01-01&end=2023-10-11>.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Firdaus, Haris. “Sebagian Jalur Evakuasi Gunung Merapi Rusak.” *Kompas.Com*, 2017. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2017/10/19/sebagian-jalur-evakuasi-gunung-merapi-rusak>.
- Indra, Mexsasai. *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*. Edited by Catur Yunianto. Cetakan I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Karnantohadi, Pung. *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Cetakan I. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/142152/permen-esdm-no-7-tahun-2020>.
- Lexy.J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revision. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mahmud. Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revision. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *UUD Negara RI Tahun 1945*. Indonesia, 2000. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.
- Mamudji, Soerjono Soekanto and Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. 21 st. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163128/permen-esdm-no-19-tahun-2020>.
- Mineral, Kementerian Energi Dan Sumber Daya. *Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 33.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Pelayanan Perizinan Subsektor Mineral Dan Batubara Pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara*. Indonesia, 2023.
- . *Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor:*

1.E/HK.03/MEM.B/2022. Indonesia, n.d.

Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Muh.Kamim, Anggalih Bayu. "Mencermati Sengkarut Operasi Tambang Pasir Di Sleman." *Mongabay:Situs Berita Lingkungan*, 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/04/29/mencermati-sengkarut-operasi-tambang-pasir-di-sleman/>.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Nurbani, Salim.HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021>.

Purnomo, A'an Efendi dan Freddy. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Pusat, Pemerintahan. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Pusat, Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>.

———. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan Pemerintah*. Indonesia, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

———. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206052/perpres-no-55-tahun-2022>.

———. *PP Nomor 19 Tahun 2022, Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/208251/pp-no-19-tahun-2022>.

———. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>.

———. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambanagn Mineral*

- Dan Batubara. Indonesia, 2009.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ridwan, and Juniarso, and Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cetakan I. Bandung: Nuansa Cendekia, 2009.
- S.F.Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Sabandar, Switzzy. "KONFLIK WARGA: Penambangan Pasir Di Kali Opak Dihentikan." *Solo Pos Jogja.Com*, 2012. <https://jogja.solopos.com/konflik-warga-penambangan-pasir-di-kali-opak-dihentikan-183813>.
- Salim.HS. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2019.
- Sumitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cetakan Ke. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1988.
- Sutendi, Adrian. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- "Galian C No More." *Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara*. Last modified 2020. <https://x.com/humasminerba/status/1281116228120018945>.
- "Garis Batas Jateng-DIY Perlu Direvisi." *DPRD PROV JATENG*. Last modified 2021. [https://dprd.jatengprov.go.id/garis-batas-jateng-diy-perlu-direvisi/#:~:text=Di satu sisi keberadaan Sungai,selatan masuk Sleman \(DIY\).](https://dprd.jatengprov.go.id/garis-batas-jateng-diy-perlu-direvisi/#:~:text=Di satu sisi keberadaan Sungai,selatan masuk Sleman (DIY).)
- "Perizinan ESDM." *Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Accessed January 6, 2025. <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>.
- "Perizinan Tambang." *Inspektur.Id*. Accessed January 8, 2025. <https://www.inspektur.id/perizinan/perizinan-tambang/5-permohonan-iup-bukan-logam-dan-batuan>.

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Amani, Asem. "Pemkab Magelang Tak Pernah Terbitkan Izin Tambang, Sekda: Itu Kewenangan Pusat." *Suara Merdeka.Com*, June 19, 2021. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04416973/pemkab-magelang-tak-pernah-terbitkan-izin-tambang-sekda-itu-kewenangan-pusat>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- AP, Agus. "Sengkarut Tambang Galian C Di Magelang, Pengusaha Pasir Kuasai 70 Persen Lahan." *Jawa Pos Radarsemarang.Id*, 2023. <https://radarsemarang.jawapos.com/magelang/721407643/sengkarut-tambang-galian-c-di-magelang-pengusaha-pasir-kuasai-70-persen-lahan>. 3.
- Arief, Ika Fitriana and Teuku Muhammad Valdy. "Tebing Di Lereng Gunung Merapi Longsor, 3 Penambang Pasir Tewas Tertimbun." *Kompas.Com*, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/19/103621778/tebing-di-lereng-gunung-merapi-longsor-3-penambang-pasir-tewas-tertimbun?page=all>.
- Ary.B.Prass. "Menilik Kualitas Pasir Merapi, Konon Lebih Hemat Semen." *Republika*, 2016. <https://news.republika.co.id/berita/oibux6414/kualitas-pasir-merapi-terbaik-kedua-di-dunia>.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim, Et.al. *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*. First. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Berge, N.M Spelt dan J.B.M ten. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Cahyono, Heru Jarot. "Minimalisir ISPA Warrag Semprot Jalur Truk Pasir." *Antara News.Com*, 2012. <https://jogja.antaranews.com/berita/304280/minimalisir-ispa-warga-semprot-jalur-truk-pasir>.
- Dwinanda, Reiny. "Kualitas Pasir Merapi Terbaik Kedua Di Dunia." *Krjogja.Com*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/oibux6414/kualitas-pasir-merapi-terbaik-kedua-di-dunia>.
- ESDM, Kementerian. "LAPORAN AKTIVITAS GUNUNG API (VOLCANIC ACTIVITY REPORT)." *Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Last modified 2023. <https://magma.esdm.go.id/v1/gunung-api/laporan/search/q?code=MER&start=2023-01-01&end=2023-10-11>.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Firdaus, Haris. "Sebagian Jalur Evakuasi Gunung Merapi Rusak." *Kompas.Com*, 2017. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2017/10/19/sebagian-jalur-evakuasi-gunung-merapi-rusak>.

- Indra, Mexsasai. *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*. Edited by Catur Yunianto. Cetakan I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Karnantohadi, Pung. *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Cetakan I. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/142152/permen-esdm-no-7-tahun-2020>.
- Lexy.J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revision. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mahmud. Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revision. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *UUD Negara RI Tahun 1945*. Indonesia, 2000. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.
- Mamudji, Soerjono Soekanto and Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. 21 st. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163128/permen-esdm-no-19-tahun-2020>.
- Mineral, Kementerian Energi Dan Sumber Daya. *Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 33.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Pelayanan Perizinan Subsektor Mineral Dan Batubara Pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara*. Indonesia, 2023.
- . *Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1.E/HK.03/MEM.B/2022*. Indonesia, n.d.
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Muh.Kamim, Anggalih Bayu. “Mencermati Sengkarut Operasi Tambang Pasir Di Sleman.” *Mongabay:Situs Berita Lingkungan*, 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/04/29/mencermati-sengkarut-operasi-tambang-pasir-di-sleman/>.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Nurbani, Salim.HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021>.

Purnomo, A'an Efendi dan Freddy. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Pusat, Pemerintahan. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Pusat, Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>.

———. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*. *Peraturan Pemerintah*. Indonesia, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

———. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206052/perpres-no-55-tahun-2022>.

———. *PP Nomor 19 Tahun 2022, Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/208251/pp-no-19-tahun-2022>.

———. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>.

———. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambanagn Mineral Dan Batubara*. Indonesia, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ridwan, and Juniarto, and Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cetakan I. Bandung: Nuansa Cendekia, 2009.

S.F.Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Sabandar, Switzky. "KONFLIK WARGA: Penambangan Pasir Di Kali Opak Dihentikan." *Solo Pos Jogja.Com*, 2012. <https://jogja.solopos.com/konflik-warga-penambangan-pasir-di-kali-opak-dihentikan-183813>.

Salim.HS. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2019.

Sumitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cetakan Ke. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1988.

Sutendi, Adrian. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

"Galian C No More." *Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara*. Last modified 2020. <https://x.com/humasminerba/status/1281116228120018945>.

"Perizinan ESDM." *Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Accessed January 6, 2025. <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>.

"Perizinan Tambang." *Inspektur.Id*. Accessed January 8, 2025. <https://www.inspektur.id/perizinan/perizinan-tambang/5-permohonan-iup-bukan-logam-dan-batuan>.